



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ 104 /405.09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *DISTRICT PUBLIC PRIVATE MIX TUBERCULOSIS* (DPPM-TBC) KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit *Tuberculosis* (TBC) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
  - b. bahwa pola pencarian pengobatan pasien *Tuberculosis* (TBC) di masyarakat menunjukkan banyak pasien *Tuberculosis* (TBC) memanfaatkan layanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Balai Pengobatan, dan Dokter Praktik Swasta;
  - c. bahkan sejak Tahun 2011, strategi *Directly Observed Treatment Short-course* (DOTS) telah diekspansi ke penyedia layanan selain puskesmas melalui pendekatan kemitraan *District Public Private Mix* (DPPM);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Tim *District Public Private Mix Tuberculosis* (DPPM-TBC) Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberculosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim *District Public Private Mix Tuberculosis* (DPPM-TBC) Kabupaten Ponorogo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memastikan mekanisme jejaring layanan penanggulangan Tuberculosis di Kabupaten Ponorogo berjalan dengan baik;
  - b. memfasilitasi rujukan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) penanggulangan Tuberculosis antar kabupaten;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan ekspansi strategi *Directly Observed Treatment Short course* (DOTS) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) penanggulangan Tuberculosis; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ponorogo melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang yang masing-masing mempunyai tugas :
- a. Bidang Advokasi dan Regulasi yaitu terjaminnya layanan penanggulangan Tuberculosis secara komprehensif sesuai dengan tatalaksana standar dan tersinergi antar semua unsur layanan kesehatan :
    - 1) mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat Kabupaten yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan *District Public Private Mix* (DPPM);
    - 2) mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan *District Public Private Mix* (DPPM);
    - 3) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada pemerintah daerah, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan institusi terkait;
    - 4) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders *Public Private Mix* (PPM) di Kabupaten Ponorogo; dan
    - 5) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menyusun alur jejaring layanan penanggulangan Tuberculosis di Kabupaten Ponorogo.

- b. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu terjaminnya kompetensi dari semua unsur masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan Tuberkulosis :
- 1) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam mengidentifikasi dan memetakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di wilayah Kabupaten Ponorogo;
  - 2) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo melakukan pembinaan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi;
  - 3) bersama Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) Tuberkulosis (TB) Kabupaten Ponorogo memfasilitasi pembinaan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi;
  - 4) bersama Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) Tuberkulosis (TB) Kabupaten Ponorogo membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam menjaga kualitas pelayanan penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - 5) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ponorogo.
- c. Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi yaitu merencanakan kegiatan sesuai kebutuhan peningkatan pelayanan penanggulangan Tuberkulosis dan memonitoring serta mengevaluasi pelayanan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ponorogo :
- 1) merencanakan kegiatan *District Public Private Mix* (DPPM) bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat;
  - 2) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam melakukan perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut Program Penanggulangan Tuberkulosis;
  - 3) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam memantau pencapaian indikator *Public Private Mix* (PPM);
  - 4) melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ponorogo, baik secara periodik maupun blusukan;
  - 5) mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi; dan
  - 6) terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ponorogo, khususnya pencapaian indikator-indikator terkait *Public Private Mix* (PPM).

**KEEMPAT** : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo dan sumber pendapatan lain yang sah, tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.




KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 02 JAN 2024

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ 104 /405.09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *DISTRICT PUBLIC PRIVATE MIX TUBERCULOSIS* (DPPM-TBC)  
KABUPATEN PONOROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua	dr. A. REZA KAUTSAR, M.Kes.	Ketua pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Ponorogo
2.	Sekretaris	WIWIK WIDIYATI, S.Kep.Ns., M.Kes.	Pengurus pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Ponorogo
3.	Bendahara	dr. PITA NURHAYANI	Kepala Seksi Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo
4.	Bidang-bidang		
	a. Bidang Advokasi dan Regulasi		
	- Koordinator	ANIK SETIYARINI, S.KM., M.Kes.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
	- Anggota	- HANA TRYASTUTI, S.Sos., M.Si.	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
		- KAMTO, S.H., M.M.	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo
		- ALIM NOOR FAIZIN, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo
		- SARI WINDRAWATI, S.Sos., M.M.	Kepala bidang Pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
		- SISWANTO, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo



1	2	3	4
	<p>b. Bidang Peningkatan SDM</p> <p>- Koordinator</p> <p>- Anggota</p>	<p>- H. SURONO, A.KS., M.M.</p> <p>- IIS SUPENTI RINTINA SARI, Amd.Kep</p> <p>- VIDY SRI WIWIT Y., S.E.</p> <p>- TITI LISTYORINI, S.H.</p> <p>- SITI DJAUHAROTUL</p> <p>ENDANG PURWANINGSIH, S.Kep.Ns., M.Kep.</p> <p>- EDI KUSNANTO, S.Kep.Ns., S.H.</p> <p>- dr. MIETHA FERDIANA PUTRI</p> <p>- dr. HESTI NILA MAYASARI, Sp.P.</p> <p>- LIS SUWARNI, S.ST., M.Kes.</p> <p>- ARIF KARTIKO, Amd.</p>	<p>Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo</p> <p>Staf penjaminan manfaat dan pengelolaan faskes pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Ketua pada Bidang 4 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Ketua pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pengurus pada Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama Ponorogo</p> <p>Kepala Prodi D3 Keperawatan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang (Polkesma) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Ketua pada Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) Tuberkulosis (TB) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Ketua pada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Ketua pada Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (Patelki) Kabupaten Ponorogo</p>

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apt. NASRUHAN ARIFianto, S.Farm., M.Farm</li> <li>- dr. PITA NURHAYANI</li> <li>- dr. TITIS RAISYATUL UMMAH</li> <li>- HERU SAPUTRO, AMK</li> <li>- dr. FIDA' MUSHALIM AFWAN</li> <li>- MOH. SYAIFUDDIN ZUHRI, S.KM., M.Kes</li> <li>- FILIA ICHA SUKAMTO, M.Kep.</li> <li>- RUMPIATI, S.ST., M.PH.</li> <li>- Dr. HARIYANTO</li> <li>- PAIMAN, S.Kep.Ns.</li> <li>- SRI LESTARI, Amd. Kep</li> </ul>	<p>Ketua pada Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Seksi Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo</p> <p>Dokter Penanggung Jawab TBC pada Rumah Sakit Umum Muslimat Kabupaten Ponorogo</p> <p>Perawat pada Rumah Sakit Umum Griya Waluya Kabupaten Ponorogo</p> <p>Dokter pada Rumah Sakit Yasyifin Darussalam Gontor Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Dosen pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo</p> <p>Dosen pada Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Buana Husada Ponorogo</p> <p>Dosen pada Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo</p> <p>Pengurus pada Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kader Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera (Yabhysa) Kabupaten Ponorogo</p>
	<p>c. Bidang Perencanaan dan Monev</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li> </ul>	<p>INDAH JUNIA EVISUSANTI, S.Pi.</p> <p>- TEGUH BUDI PRIHWANTO, S.Sos., M.MKes.</p>	<p>Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</p>

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Dra. RUSDIANA</li> <li>- WIWIEK RETTI A., S.Kep.Ns., M.Kep.</li> <li>- ERNI PRASETYA- NINGSIH, S.E., M.Si.</li> <li>- MINUK SUHARTINI, S.E.</li> <li>- SITI KHOIRUL JANNAH</li> <li>- METTI VERAWATI, S.Kep.Ns., M.Kes.</li> <li>- drg. WAHYU HIDA- YAT</li></ul>	<p>Anggota pada Kelompok Kerja (Pokja) IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Dosen pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang (Polkesma) Kabupaten Pono-rogo</p> <p>Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kader Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera (Yabhysa) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Majlis Kesehatan pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Sekretaris pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Anggota pada Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kabupaten Ponorogo</p>

BUPATI PONOROGO

  
SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	